



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ) BKPP TAHUN ANGGARAN 2018**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BERAU
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018**

Kata Pengantar

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada pemerintah. Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Pemerintah serta menginformasikan LKPJ kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan diatas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau telah menyusun bahan LKPJ Kabupaten Berau Tahun 2019. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Tanjung Redeb, 14 Januari 2020

Kepala BKPP Kabupaten Berau

MUHAMMAD SAID, S.H., M.H.

PEMBINA

NIP.19790723 200212 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN		
1	Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	1
2	Dasar Hukum Susunan Organisasi	1
3	Nama Perangkat Daerah	1
4	Urusan Pemerintah Yang Dilaksanakan	1
5	Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Per 31 Desember 2019.	2
6	Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Per 31 Desember 2019	3
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
1	Program dan Kegiatan	8
2	Program Prioritas OPD dan Realisasi Tahun 2019 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021	11
3	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan DPA OPD Tahun 2019	11
4	Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas OPD Tahun 2019 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021	20
5	Permasalahan dan Solusi	21
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN		23
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN		
1	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (MOU BKPP dengan Pihak Ketiga) yang berlaku s.d. Tahun 2019.	24
2	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	29
3	Permasalahan dan Solusi	29
BAB V PRESTASI YANG DIPEROLEH OPD		31
BAB VI PENUTUP		
1	Kesimpulan dan Saran	32

BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dasar Hukum Pembentukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau.

2. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

3. Nama Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

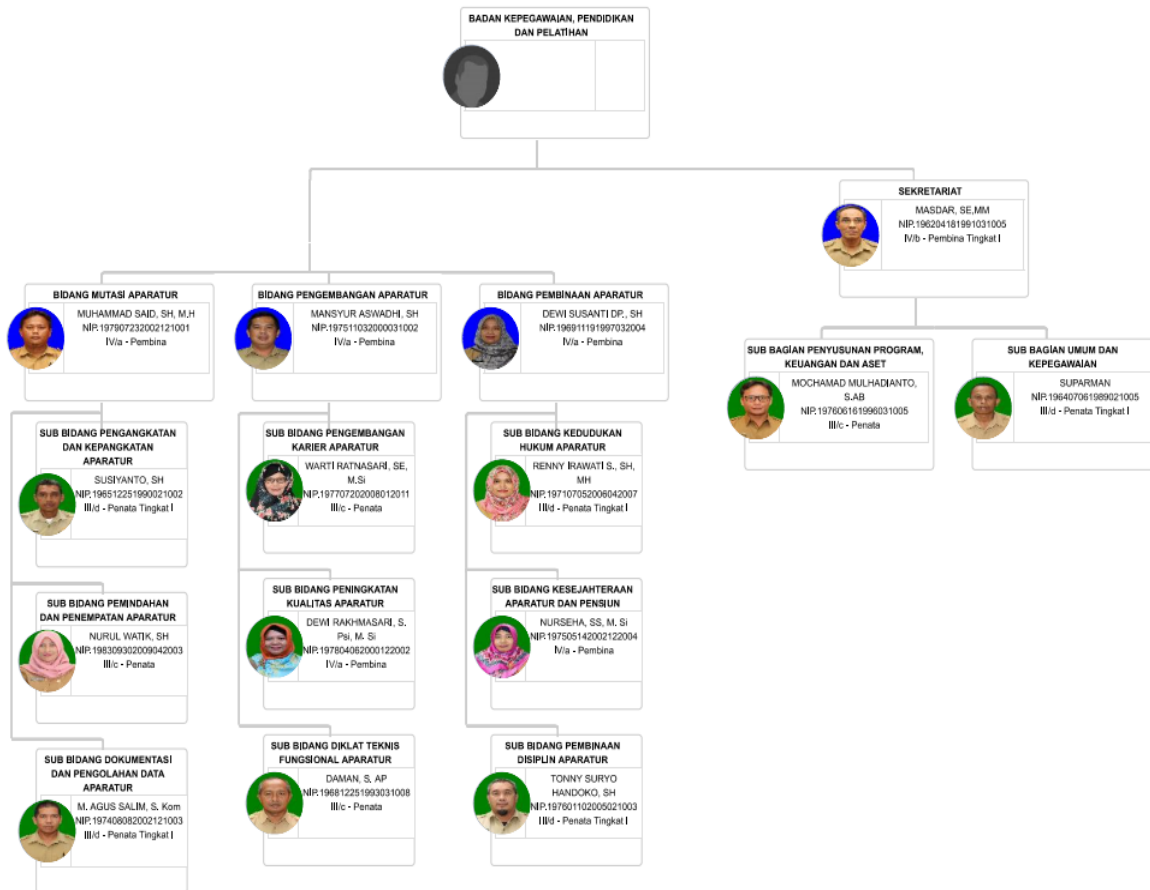
4. Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan

Urusan Pemerintah yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar .Peraturan Bupati Berau Nomor 73 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan.

5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau secara lengkap menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan dapat dilihat pada dibawah ini :

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan



6. DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN PER 31 DESEMBER 2019

BKPP KABUPATEN BERAU

NO	NAMA PEGAWAI			NIP	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA	LATHAN JABATAN		PENDIDIKAN AKHIR		AGAMA
	TEMPAT/IGL	LAHIR			GOL/ RU	TMT	ESELO N	NAMA JABATAN	TMT	TAHUN BUL AN	NAMA	TAHUN	NAMA JURUSAN	THN LULUS	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	MASDAR, SE.MM	JAMBI	18/04/1962	196204181991031005	IV/b	01/04/2007	III.A	SEKRETARIS SEKRETARIS BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATHAN	02/07/2018	26 Tahun 0 bulan	DIKLAT PM TK III	2007	S-2 S-2 MAGISTER MANAJEMEN	2002	Islam
2	DEWI SUSANTI DP. SH	Baikpapan	19/11/1969	196911191997032004	IV/a	01/10/2012	III.B	KEPALA BIDANG PEMBINAAN APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATHAN	03/01/2017	21 tahun 03 bulan	DIKLAT PM TK III	2012	S-1 S-1 ILMU HUKUM	1995	Islam
3	MANSYUR ASWADHI, SH	BERAU	03/11/1975	197511032000031002	IV/a	01/10/2016	III.B	KEPALA BIDANG PEMBINAAN APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATHAN	03/01/2017	18 tahun 03 bulan	DIKLAT PM TK III	2004	S-1 ILMU HUKUM	1999	Islam
4	MUHAMMAD SAID, SH.MH	BERAU	23/07/1979	197907232002121001	IV/a	01/10/2015	III.B	KEPALA BIDANG MUTASI APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATHAN	22/11/2018	17 Tahun 00 Bulan	DIKLAT PM TK III	2019	S-2 S-2 ILMU HUKUM	2012	Islam
5	DEWI RAKHMASARI, S. Pa, M.Si	Baikpapan	06/04/1976	197604062000122002	IV/a	01/04/2018	IV.A	KEPALA SUB BIDANG PENINGKATAN KUALITAS APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATHAN	12/01/2017	18 tahun 12 bulan	DIKLAT PM TK IV	2012	S-2 S-2 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2015	Islam
6	NURSEHA, SS, M.Si	Citilang	14/05/1975	197505142002122004	IV/a	01/04/2018	IV.A	KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN APARATUR DAN PENSIUN APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATHAN	12/01/2017	16 tahun 12 bulan	DIKLAT PM TK IV	2010	S-2 S-2 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2015	Islam
7	SUPARMAN	Sieman	06/07/1964	196407061989021005	III/d	01/04/2014	IV.A	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATHAN	12/01/2017	29 tahun 02 bulan	ADUM	1998	SLTA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)	1984	Islam
8	M. AGUS SALMA, S. Kom	BERAU	08/08/1974	19740808200202121003	III/d	01/04/2015	IV.A	KEPALA SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN PENYOLAHAN DATA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATHAN	17/12/2018	16 Tahun 00 Bulan	DIKLAT PM TK IV	2012	S-1 S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2000	Islam

9	TONNY SURYO HANDOKO, SH	Yogyakarta	10/01/1 976	1976011020060210 03	III/d	01/10/2 016	IV.A	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	12/01/2 017	13 tahun 02 bulan	DIKLAT PM TK.IV	2012	S-2 ILMU HUKUM	2012	Islam
10	SUSYANTO, SH	Semarang	25/12/1 965	1965122519900210 02	III/d	01/10/2 017	IV.A	KEPALA SUB BIDANG PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	12/01/2 017	28 tahun 02 bulan	ADUM	1998	S-1 ILMU HUKUM	2005	Islam
11	RENNY IRAWATI S., SH, MH	Balikpapan	05/07/1 971	1971070520060420 07	III/d	01/04/2 017	IV.A	KEPALA SUB BIDANG KEDUDULKAN HUKUM APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	12/01/2 017	12 tahun 04 bulan	DIKLAT PM TK. IV	2017	S-2 MAGISTER ILMU HUKUM	2013	Islam
12	DAMAN, S. AP	Tulung Agung	25/12/1 968	1968122519900310 08	III/c	01/04/2 016	IV.A	KEPALA SUB BIDANG DIKLAT FUNGSIONAL BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	17/12/2 018	20 tahun 00 bulan	LATHAN PRAJABA TAN	1994	S-1 S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2007	Islam
13	WARTI RATNASARI, SE	Kendal	20/07/1 977	1977072020080120 11	III/c	01/04/2 016	IV.A	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	12/01/2 017	10 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABA TAN	2009	S-1 MANAJEMEN	2002	Islam
14	MOCHAMAD MULHADANTO,SAB	Tuban	16/06/1 976	1976061619960310 05	III/c	01/04/2 018	IV.A	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	17/12/2 018	22 Tahun 9 Bulan	LATHAN PRAJABA TAN	1997	S-1 S-1 Administrasi Bisnis	2010	Islam
15	NURUL WATIK, SH	Kediri	30/19/1 983	1983093020090420 03	III/c	01/04/2 017	IV.A	KEPALA SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	17/12/2 018	08 Tahun 00 Bulan	LATHAN PRAJABA TAN	2010	S-1 S-1 ILMU HUKUM	2006	Islam
16	FITRIANSYAH, A.Md	Gunung Tabur	20/11/1 971	1971112019970310 03	III/c	01/04/2 016	Non Ess	PELAKSANA	01/04/2 012	21 tahun 03 bulan	LATHAN PRAJABA TAN		D-3 / Sarmad / Akademi	1994	Islam
17	VIRNA YULIANI, SE	Tanjung Selor	08/07/1 975	1975070820090120 03	III/c	01/04/2 017	Non Ess	PELAKSANA	01/01/2 009	9 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABA TAN	2010	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	2004	Islam
18	DWI HARJANTI, S.Psi	Purworejo	20/12/1 982	1982122020090420 07	III/c	01/04/2 017	Non Ess	PELAKSANA	01/04/2 009	9 tahun 04 bulan	LATHAN PRAJABA TAN	2010	S-1 SARJANA PSIKOLOGI	2006	Islam

19	ZUSSANNAH, S.Pi	Bone	22/12/1978	19781222010012015	IIIc	01/042018	Non Ess	PELAKSANA	01/09/2017	14 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2011	S-1 BUDIDAYA PERAIRAN	2001	Islam
20	INDRIYATI, ST	Tolitoli	28/12/1979	197912282010012001	IIIc	01/042018	Non Ess	PELAKSANA	09/01/2017	8 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2011	S-1 S-1 TEKNIK GEOLOGI	2003	Islam
21	NURUL KAMARIAH, SE	Berau	28/09/1983	198309282002122002	IIIc	01/102018	Non Ess	PELAKSANA	15/09/2014	16 tahun 12 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2003	S-1 S-1 EKONOMI MANAJEMEN	2009	Islam
22	WARSIANIK, S.AP	Nganjuk	15/07/1974	197407151998032004	IIIc	01/102018	Non Ess	PELAKSANA	01/10/2010	19 tahun 03 bulan	LATHAN PRAJABATAN	1999	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2008	Protestan
23	MUTYA MAHANI, SH	Yogyakarta	11/05/1985	198505112011012014	IIIc	01/042019	Non Ess	PELAKSANA	01/03/2016	7 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2012	S-1 S-1 ILMU HUKUM	2007	Islam
24	ERICK FEBRIANSYAH, S.Sos	Berau	04/02/1988	198802042011011002	IIIc	01/042019	Non Ess	PELAKSANA	24/01/2014	7 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2012	S-1 S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2010	Islam
25	FNE ENNANDRIANITA, SH.MH	Pati	31/12/1984	198412312011012011	IIIc	01/042019	Non Ess	PELAKSANA	03/01/2017	8 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2012	S-2 S-2 ILMU HUKUM	2018	Islam
26	FERI DIANSYAH, A.Md	BERAU	12/03/1979	197903122002121003	IIIc	01/042019	Non Ess	PELAKSANA	02/01/2017	16 tahun 12 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2015	D-3 / Sarma / Akademi D-III EKONOMI AKUNTANSI	2002	Islam
27	NORLALA	Tanjung Redab	17/11/1975	197511171998032002	IIIb	01/042018	Non Ess	PELAKSANA	01/04/2010	20 tahun 03 bulan	LATHAN PRAJABATAN	1998	SLTA SMA IPA	1994	Islam
28	MUHAMMAD BASIR, S.AP	BERAU	05/05/1972	197205052006021001	IIIb	01/042018	Non Ess	PELAKSANA	29/01/2014	13 tahun 02 bulan	LATHAN PRAJABATAN		S-1 S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2014	Islam

29	EFAN WAHYUDI, SE	BERAU	09/03/1981	198103092008011011	IIIb	01/10/2018	Non Ess	PELAKSANA	11/01/2017	10 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2009	S-1 EKONOMI	2010	Islam
30	DIEN NOVITA DINI, A.KA	Tanjung Redeb	25/11/1976	197611252007012016	IIIb	01/04/2019	Non Ess	PELAKSANA	03/02/2015	11 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2008	D-3 / Sarma / Akademi D-III EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN	1998	Islam
31	SRI MAGEFIRA RAMLI, S.STP	MAMUJU	02/05/1994	199405022016092001	IIIa	01/09/2016	Non Ess	PELAKSANA	01/10/2017	0 tahun 11 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2017	D-IV Politik Pemerintahan	2017	Islam
32	MUHAMMAD KHAIDIR DANA DRAJAT, S.STP	BONE	11/07/1993	199307112016091001	IIIa	01/09/2016	Non Ess	PELAKSANA	01/10/2017	0 tahun 11 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2017	D-IV Politik Pemerintahan	2017	Islam
33	MASDAR JONISE	Tanjung Redeb	13/11/1977	197711132008011009	IIIa	01/04/2019	Non Ess	PELAKSANA	01/04/2012	10 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2009	S-1 EKONOMI	1998	Islam
34	SRI WAHYUNI	Malang	24/04/1976	197604242002122009	IIIa	01/04/2019	Non Ess	PELAKSANA	01/08/2016	18 tahun 09 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2003	SLTA SMEA PERDAGANGAN	1994	Islam
35	PATRI JUARI S.STP	BULUNGAN	09/01/1996	199601092019082001	IIIa	01/08/2018	Non Ess	PELAKSANA	01/10/2019	01 Tahun 02 Bulan	LATHAN PRAJABATAN	2019	D-IV Politik Pemerintahan	2019	Kristen Protestan
36	DOLY PRIMA SANTURI S.IP	Pontianak	03/04/1995	199504032018081001	IIIa	01/08/2018	Non Ess	PELAKSANA	01/10/2019	01 Tahun 02 Bulan	LATHAN PRAJABATAN	2019	S-1 Politik Pemerintahan	2019	Kristen Protestan
37	SANTI PALUPLI, ST	Berau	28/12/1987	198712282019032000	IIIa	01/03/2019	Non Ess	PELAKSANA	01/10/2019	0 Tahun 09 Bulan	LATHAN PRAJABATAN	2019	D-IV Teknologi Informatika	2011	Islam
38	HAMSAH, S.Kom	Bulungan	21/01/1998	199801212019031005	IIIa	01/03/2019	Non Ess	PELAKSANA	01/03/2019	0 Tahun 09 Bulan	LATHAN PRAJABATAN	2019	S-1 Informatika	2013	Islam

39	DJOYO SATMOKO,SH	Jakarta	05/06/1992	199201052019031006	IIIa	01/03/2019	Non Ess	PELAKSANA	01/03/2019	0 Tahun 09 Bulan	LATHAN PRAJABATAN	2019	S-1 ILMU HUKUM	2015	Islam
40	KASORI	Minggir	09/03/1972	197203092007011017	IIId	01/04/2019	Non Ess	PELAKSANA	01/04/2019	11 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2008	SLTA STM MESIN	1990	Islam
41	JUSRI, A.MI	Baru	11/09/1983	198309112011011004	IIId	01/04/2015	Non Ess	PELAKSANA	01/08/2016	7 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2012	D-3 / Sarjana / Akademi D-III TEKNIK INFORMATIKA	2006	Islam
42	BURHANUDDIN	Tanjung Redeb	28/09/1981	198109282007011002	IIId	01/04/2019	Non Ess	PELAKSANA	01/04/2019	11 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2008	SLTA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)	2001	Islam
43	RITA SUSANTI	JAKARTA	01/11/1980	198011012008012001	IIId	01/04/2016	Non Ess	PELAKSANA	01/01/2008	10 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2009	SLTA	1999	Islam
44	JAMALUDDIN	Gunung Tabur	23/03/1980	198003232009011006	IIId	01/04/2017	Non Ess	PELAKSANA	17/10/2012	9 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2010	SLTA SMA A3/IPS	1999	Islam
45	ERLAN R	Batu-Batu	20/10/1984	198410202009011004	IIId	01/04/2017	Non Ess	PELAKSANA	01/01/2009	9 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2010	SLTA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)	2002	Islam
46	HENDRA SAPUTRA	BERAU	08/04/1984	198404082009011003	IIId	01/04/2017	Non Ess	PELAKSANA	01/01/2009	9 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2010	SLTA SMA A3/IPS	2002	Islam
47	DT RACHMAT MUMININ	BERAU	19/09/1984	198409192010011024	IIId	01/10/2018	Non Ess	PELAKSANA	15/01/2019	14 Tahun 07 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2011	SLTA PAKET C	2003	Islam
48	NOOR HARDIANSYAH	Tanjung Batu	20/01/1976	197601202009011005	IIId	01/04/2017	Non Ess	PELAKSANA	01/01/2009	9 tahun 01 bulan	LATHAN PRAJABATAN	2010	SD SEKOLAH DASAR	1990	Islam

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dimana merupakan unsur Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

A. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau melaksanakan Urusan Pemerintahan fungsi Penunjang yang dijabarkan dalam 5 (lima) Program dan 36 (tiga puluh enam) Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel 2.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Program Kegiatan dan Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	100.000.000,00
3	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	277.500.000,00

4	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	103.500.000,00
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102.384.000,00
6	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	7.739.000,00
7	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.000.000,00
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000,00
9	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000,00
13	Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	240.000.000,00
14	Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	115.000.000,00
15	Penyediaan Jasa Tenaga Administratif/Teknis Perkantoran	672.200.000,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Penyediaan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	17.500.000,00
2	Sosialisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD	1.690.000.000,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Lemhanas / Program Pemantapan Pimpinan	
3	Pengiriman Latihan Prajabatan Golongan II dan III / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS	1.450.000.000,00
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
1	Seleksi Penerimaan Calon PNS	711.500.000,00

2	Penempatan PNS	330.000.000,00
3	Pengurusan Kenaikan Pangkat bagi PNS	242.000.000,00
4	Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi (SIMPEG)	140.000.000,00
5	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	422.500.000,00
6	Pengurusan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Bagi PNS yang berprestasi melalui Pemberian Tanda Kehormatan SLKS	80.000.000,00
7	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	100.000.000,00
8	Pemberian Biaya Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemkab Berau	705.000.000,00
9	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi ASN di Lingkungan Pemkab Berau	75.000.000,00
10	Pengurusan SK Pensiun dan Klaim Tepat Waktu	180.000.000,00
11	Penyelesaian Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen di Lingkungan Pemkab Berau	79.680.000,00
12	Pemetaan Kompetensi Jabatan Struktural PNS	347.797.000,00
13	Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Bagi PNS Kab. Berau	50.000.000,00
14	Proses penanganan kasus-kasus Hukum PNS	75.000.000,00
15	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan BKPP Kabupaten Berau	105.000.000,00
16	Peningkatan Kinerja Dan Sumber Daya Aparatur	529.072.000,00
	JUMLAH Rp	9.077.872.000,00

B. Program Prioritas OPD dan Realisasi Tahun 2019 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021.

NO	Program Prioritas (RPJMD)	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		OPD	Realisasi
			2019	2011		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Aparatur SKPD yang mendapatkan sanksi Kepegawaian (Orang)	3 Orang	3 Orang	BKPP	6 Orang
		Presentase Eselon II yang dilakukan lelang jabatan	20 Orang	66 Orang	BKPP	69 Orang
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta yang lulus Diklat PIM IV dan III	21 Orang	165 Orang	BKPP	21 Orang

C. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	2.709.000,00	2.291.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	100.000.000,00	91.946.814,00	8.053.186,00
3	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	277.500.000,00	251.285.000,00	26.215.000,00
4	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	103.500.000,00	61.485.841,00	42.014.159,00
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102.384.000,00	102.008.000,00	376.000,00

6	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	7.739.000,00	7.588.300,00	150.700,00
7	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.000.000,00	9.430.000,00	5.570.000,00
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	14.996.500,00	3.500,00
9	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	4.135.200,00	15.864.800,00
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	7.455.000,00	45.000,00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000,00	19.937.700,00	62.300,00
13	Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	240.000.000,00	230.469.433,00	9.530.567,00
14	Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	115.000.000,00	92.100.000,00	22.900.000,00
15	Penyediaan Jasa Tenaga Administratif/Teknis Perkantoran	672.200.000,00	636.086.600,00	36.113.4000,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Penyediaan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	19.075.000,00	925.000,00
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			

1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	17.500.000,00	10.642.299,00	6.857.701,00
2	Sosialisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	19.994.000,00	6.000,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD	1.690.000.000,00	1.630.294.188,00	59.705.812,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Lemhanas / Program Pemantapan Pimpinan			0,00
3	Pengiriman Latihan Prajabatan Golongan II dan III / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS	1.450.000.000,00	1.444.166.440,00	5.833.560,00
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			
1	Seleksi Penerimaan Calon PNS	711.500.000,00	537.030.268,00	174.469.732,00
2	Penempatan PNS	330.000.000,00	309.850.000,00	20.150.000,00
3	Pengurusan Kenaikan Pangkat bagi PNS	242.000.000,00	234.847.142,00	7.152.858,00
4	Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi (SIMPEG)	140.000.000,00	128.039.880,00	11.960.120,00
5	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	422.500.000,00	411.868.445,00	10.631.555,00
6	Pengurusan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Bagi PNS yang berprestasi melalui Pemberian Tanda Kehormatan SLKS	80.000.000,00	74.906.900,00	5.093.100,00

7	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	100.000.000,00	98.899.800,00	1.100.200,00
8	Pemberian Biaya Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemkab Berau	705.000.000,00	701.272.093,00	3.727.907,00
9	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi ASN di Lingkungan Pemkab Berau	75.000.000,00	72.610.800,00	2.389.200,00
10	Pengurusan SK Pensiun dan Klaim Tepat Waktu	180.000.000,00	179.979.997,00	20.003,00
11	Penyelesaian Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen Dilingkungan Pemkab. Berau	79.680.000,00	79.679.932,00	68,00
12	Pemetaan Kompetensi Jabatan Struktural PNS	347.797.000,00	216.828.695,00	130.968.305,00
13	Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Bagi PNS Kab. Berau	50.000.000,00	49.902.388,00	97.612,00
14	Proses penanganan kasus-kasus Hukum PNS	75.000.000,00	74.973.614,00	26.386,00
15	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan BKPP Kabupaten Berau	105.000.000,00	97.755.000,00	7.245.000,00
16	Peningkatan Kinerja Dan Sumber Daya Aparatur	529.072.000,00	330.905.300,00	198.166.700,00

	JUMLAH Rp	9.077.872.000,00	8.262.155.569,00	815.716.431,00
--	-----------	------------------	------------------	----------------

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2019 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 9.077.872.000,00 yang terbagi dalam 5 (lima) program dan 36 (Tiga Puluh enam) kegiatan.

3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Program ini terdapat 15 (lima belas) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 2.709.000,- dengan tingkat pencapaian sebesar 54,18%.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 91.946.814,- dengan tingkat pencapaian sebesar 91,95%.

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp 103.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 61.485.841,- dengan tingkat pencapaian sebesar 59,41%

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp 102.384.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 102.008.000,- dengan tingkat pencapaian sebesar 99,63%.

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp 7.739.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 7.588.300,- dengan tingkat pencapaian sebesar 98,05%.

6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 9.430.000,- dengan tingkat pencapaian sebesar 62,87%.

7. Penyediaan alat tulis kantor

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 15.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 14.996.500,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 99,98%.

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 20.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 4.135.200,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 20,68%.

9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 7.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 7.000.000,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 100%.

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 277.500.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 251.285.000,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 90,55%.

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 7.500.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 7.455.000,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 99,40%.

12. Penyediaan makanan dan minuman

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 20.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 19.937.700,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 99,69%.

13. Rapat-rapat koordinasai dan konsultasi ke luar daerah

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 240.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 230.469.433,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 96,03%.

14. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 115.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 92.100.000,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 80,09%.

15. Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 672.200.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 636.086.600,-* dengan tingkat pencapaian sebesar *94,63%*.

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Kendaraan Bermotor

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 20.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 19.075.000,-* dengan tingkat pencapaian sebesar *95,38%*.

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 17.500.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 10.642.299,-* dengan tingkat pencapaian sebesar *60,81%*.

2. Sosialisasi Kinerja Program SKPD

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 20.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 19.994.000,-* dengan tingkat pencapaian sebesar *99,97%*.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 1.690.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 1.630.294.188,-* dengan tingkat pencapaian sebesar *96,47%*.

2. Pengiriman Latihan Prajabatan Golongan II dan III / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 1.450.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 1.444.166.440,-* dengan tingkat pencapaian sebesar *99,60%*.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pada Program ini terdapat 16 (enam belas) kegiatan yaitu :

1. Seleksi Penerimaan Calon PNS

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 711.500.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 537.030.268,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 75,48%.

2. Penempatan PNS

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 330.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 309.850.000,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 93,89%.

3. Pengurusan Kenaikan Pangkat Bagi PNS

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 242.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 234.847.142,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 97,04%.

4. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 140.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 128.039.880,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 91,46%.

5. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 422.500.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 411.868.445,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 97,48%.

6. Pengurusan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Bagi PNS yang berprestasi melalui Pemberian Tanda Kehormatan SLKS

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 80.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 74.906.900,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 93,63%.

7. Proses Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 100.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 98.899.800,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 98,90%.

8. Pemberian Biaya Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Bagi PNS di Lingkungan Pemkab Berau
Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 705.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 70.272.093,-* dengan tingkat pencapaian sebesar *99,47%*.
9. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi ASN di Lingkungan Pemkab Berau
Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 75.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 72.610.800,-* dengan tingkat pencapaian sebesar *96,81%*.
10. Pengurusan SK Pensiun dan Klaim Tepat Waktu
Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 180.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 179.979.997,-* dengan tingkat pencapaian sebesar *99,99%*.
11. Penyelesaian Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen di Lingkungan Pemkab Berau
Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 79.680.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 79.679.932,-* dengan tingkat pencapaian sebesar *100%*.
12. Pemetaan Kompetensi Jabatan Struktural PNS
Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 347.797.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 216.828.695,-* dengan tingkat pencapaian sebesar *62,34%*.
13. Pelaksanaan PP No 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Bagi PNS Kab. Berau
Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 50.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 49.902.388,-* dengan tingkat pencapaian sebesar *99,80%*.
14. Proses Penanganan Kasus-Kasus Hukum PNS
Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp 75.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 74.973.614,-* dengan tingkat pencapaian sebesar *99,96%*.
15. Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan BKPP Kab. Berau

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp 105.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 97.755.000,- dengan tingkat pencapaian sebesar 93,10%.

16. Peningkatan Kinerja Dan Sumber Daya Aparatur

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp 529.072.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 330.905.300,- dengan tingkat pencapaian sebesar 62,54%.

Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 91,01% sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 8.262.155.569,00 dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 9.077.872.000,00 atau 91,01% Pencapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala kategori penilaian **Sangat Baik**.

D. Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas OPD Tahun 2019 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

NO	Program Prioritas (RPJMD)	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja RPJMD		Realisasi (RP)
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan				
1	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran		100	BKPP	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	BKPP	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		5 kasus	BKPP	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	BKPP	
			100		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Kinerja OPD yang memenuhi Standar	15 Laporan	BKPP	

6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		100 (20 Orang)	BKPP	
---	---	--	----------------	------	--

E. Permasalahan dan Solusi

5.1 Permasalahan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 91,01%, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau masih mengalami kendala dan permasalahan antara lain :

- 1) Masih banyaknya PNS yang belum memahami Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian terutama yang menyangkut penindakan terhadap PNS yang terlibat kasus tindak pidana;
- 2) Adanya pemahaman yang tidak sama dalam penerapan pemberhentian sementara untuk kepentingan peradilan dan proses penyelesaian status kepegawaian PNS setelah kasus tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Kurangnya kesadaran PNS pengurusan Karpeg, Karis, Karsu dan Kartu Peserta Taspen untuk menyampaikan berkas usulan secara tepat waktu ke BKPP baik yang baru mengusul maupun yang bagi PNS yang kehilangan kartu untuk diusulkan dan dibuatkan kembali kartu yang hilang;
- 4) Sarana gedung masih kurang.
- 5) Ketersediaan sarana komputer masih kurang
- 6) Jaringan yang Macet sehingga memperlambat Penginputan Data PNS BUP kedalam SAPK Pensiun.
- 7) Ketersediaan SDM masih sangat terbatas
- 8) Inovasi layanan masih belum optimal
- 9) Pagu anggaran setiap tahun masih sangat minim

10) Pelaksanaan Pengiriman Diklat Pimpinan Masih kurang.

a. Solusi

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau ada beberapa solusi yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Adanya Sosialisasi terhadap PNS agar memahami Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian menyangkut penindakan terhadap PNS yang terlibat kasus tindak pidana;
- b. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perlu dibangun Gedung BKPP yang refresentatif yang di desain secara khusus.
- c. Untuk menunjang kelancaran pekerjaan perlu ditambah sarana komputer yang memadai
- d. Agar Aplikasi pada BKPP yang masih lemah untuk dapat ditambah bandwidthnya supaya kuat jaringannya
- e. Agar SDM BKPP Kab. Berau menjadi pegawai yang handal dan terampil perlu disediakan dana untuk mengikuti diklat teknis di Bidang Kepegawaian.
- f. Agar inovasi layanan dapat berjalan maksimal perlu disediakan anggaran yang memadai sesuai peruntukannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota biasanya bersumber dana dari APBN Kementerian.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau untuk tahun 2019 tidak ada melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat baik itu dari Kementerian maupun dari lembaga lainnya, sehingga tidak tergambar dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Instansi dengan Pihak ketiga diluar Daerah

a. Kebijakan dan Kegiatan

Pada tahun 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Telah Melaksanakan MOU dengan Beberapa Instansi Pemerintah sebagai berikut:

A. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR

1. Mitra yang diajak kerjasama

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur

2. Dasar Hukum

Nomor MOU : 893/657/BKPP-II/2019

Nomor MOU : 893.2/26252/205.2.1/2019

3. Nama Kegiatan

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VIII Tahun 2019.

4. Perangkat daerah yang menyelenggarakan kerjasama adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Tingkat III Angkatan VIII Tahun 2019 sebagai Berikut :

1) Drs. H. Abdul Rifai sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau disebut Pihak Pertama'

2) Dr. H. IG. NG. INDRA S. RANUH, SH, CN,M.Si. Sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Alamat di Jalan Balongsari Tama Tandes Surabaya disebut Pihak Kedua.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp 154.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah*).

6. Jangka Waktu Kerjasama

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VIII Tahun 2019 pada Tanggal 18 Juni sampai dengan 26 September 2019.

B. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH (PUSLATBANG KDOD)

1. Mitra yang diajak kerjasama

PUSLATBANG KDOD

2. Dasar Hukum

Nomor MOU : 893.3/660/BKPP-II/2019

Nomor MOU : 1005/PKD1.1./HKM.03.

3. Nama Kegiatan

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2019.

4. Perangkat daerah yang menyelenggarakan kerjasama adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2019 sebagai berikut :

1) Drs. H. Abdul Rifai sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau disebut Pihak Pertama.

2) Dr. Mariman Darto, M,Si. Sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dalam hal ini bertindak atas nama Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang berkedudukan di Jalan H.M. Ardan Samarinda disebut Pihak Kedua.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp 121.044.000,- (*Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).

6. Jangka Waktu Kerjasama.

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun pada Tanggal 24 Juni s.d. 16 Oktober 2019.

**C. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENDAGRI REGIONAL YOGYAKARTA**

1. Mitra yang diajak kerjasama
PPSDM Kemendagri Yogyakarta
2. Dasar Hukum
Nomor MOU : 893.3/871/BKPP-II/2019
Nomor MOU : 873.2/08/397/PPSDM/2019.
3. Nama Kegiatan
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VI Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
4. Perangkat daerah yang menyelenggarakan kerjasama adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VI Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sebagai Berikut :

- 1) Drs. H. Abdul Rifai sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau disebut Pihak Pertama.
 - 2) Ir. Suroyo, M.Si. Sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Melati Kulon Nomor 1 Barico Yogyakarta disebut Pihak Kedua.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber Pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019, *sebesar Rp. 60.960.000,- (Enam Puluh Juta Sembilan ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).*
 6. Jangka Waktu Kerjasama.
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VI Tahun 2019 pada Tanggal 12 Juli s.d. 25 Oktober 2019.

D. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR

1. Mitra yang diajak kerjasama
BPSDM Provinsi Jawa Timur
2. Dasar Hukum
Nomor MOU : 893.3/872/BKPP-II/2019
Nomor MOU : 893.2/34762/205.2.2/2019.
3. Nama Kegiatan
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XVI Tahun 2019.
4. Perangkat daerah yang menyelenggarakan kerjasama adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XVI Tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Drs. H. Abdul Rifai sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau disebut Pihak Pertama.
- 2) Dr. H. IG. NG. INDRA S. RANUH, SH, CN,M.Si. Sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Alamat di Jalan Balongsari Tama Tandes Surabaya disebut Pihak Kedua.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber Pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
6. Jangka Waktu Kerjasama.
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XVI Tahun 2019 pada Tanggal 06 Agustus s.d. 15 November 2019.

E. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH (PUSLATBANG KDOD)

1. Mitra yang diajak kerjasama

PUSLATBANG KDOD

2. Dasar Hukum

Nomor MOU : 893.3/1194/BKPP-II/2019

Nomor MOU : 1904/PKD1.1./HKM.03.

3. Nama Kegiatan

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXIV Tahun 2019.

4. Perangkat daerah yang menyelenggarakan kerjasama adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXIV Tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Drs. H. Abdul Rifai sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau disebut Pihak Pertama.
- 2) Dr. Mariman Darto, M,Si. Sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dalam hal ini bertindak atas nama Pusat Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang berkedudukan di Jalan H.M. Ardan Samarinda disebut Pihak Kedua.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp. 80.920.000,- (*Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

6. Jangka Waktu Kerjasama.

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXIV Tahun 2019 pada Tanggal 11 September s.d. 14 Desember 2019.

F. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH (PUSLATBANG KDOD)

1. Mitra yang diajak kerjasama

PUSLATBANG KDOD

2. Dasar Hukum

Nomor MOU : 893.3/1442/BKPP-II/2019

Nomor MOU : 1915/PKD1.1./HKM.03.

3. Nama Kegiatan

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Angkatan VII Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2019.

4. Perangkat daerah yang menyelenggarakan kerjasama adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Angkatan VII bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Drs. H. Abdul Rifai sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau disebut Pihak Pertama.
- 2) Dr. Mariman Darto, M,Si. Sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dalam hal ini bertindak atas nama Pusat Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang berkedudukan di Jalan H.M. Ardan Samarinda disebut Pihak Kedua.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019, sebesar *Rp. 371.840.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).*

6. Jangka Waktu Kerjasama.

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Angkatan VII Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2019 pada Tanggal 18 Oktober s.d. 14 Desember 2019.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Realisasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD anggaran yang tersedia sebesar *Rp 1.690.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 1.630.294.188,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 96,47%
- 2) Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengiriman Latihan Prajabatan Golongan II dan III / Pelatihan Dasar CPNS dengan anggaran yang tersedia sebesar *Rp 1.450.000.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp 1.444.166.440,-* dengan tingkat pencapaian sebesar 99,60 %.

c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, permasalahan yang sering terjadi adalah :

- a) Jadwal Pelaksanaan Diklat harus menunggu Pihak Ketiga
- b) MOU / Kesepakatan dengan Pihak Ketiga terjadi perubahan

2. Solusi

- a) Melaksanakan Koordinasi secara intensif dengan Pihak Ketiga mengenai pelaksanaan Kegiatan
- b) Merevisi MOU sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan yang berlaku

BAB V

PRESTASI YANG DIPEROLEH OPD

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau pada Tahun 2019 belum menerima penghargaan.

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah dijelaskan beberapa hal dari beberapa BAB diatas maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat.
- b. Pada Bab III terdapat urusan tugas pembantuan, hal ini belum terlaksana karena pada tahun 2019 belum ada urusan tugas pembantuan yang diamanatkan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

2. Saran

Sehubungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2019, ada beberapa saran yang dapat kami sampaikan sesuai dengan kondisi OPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai pada tahun 2019, tentunya masih perlu ditingkatkan agar program yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2019 akan dilakukan evaluasi untuk dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang
- b. Mengingat LKPJ OPD adalah sumber data untuk menyusun LKPJ Kabupaten Berau, agar kiranya Tim penyusun LKPJ Kabupaten dapat memberi ruang waktu

yang cukup mengingat di awal tahun hampir semua laporan dikerjakan hampir bersamaan, sehingga dengan waktu yang cukup kami dari OPD dapat mempersiapkan data yang lebih akurat dan teliti.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) OPD ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Redeb, 14 Januari 2020

KEPALA

MUHAMMAD SAID, SH, MH

PEMBINA

NIP. 19790723 200212 1 001

